

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setelah runtuhnya kekuasaan VOC pada Tahun 1799, kemudian diambil alih oleh pemerintah Kolonial Belanda (1800-1942). Pergantian kekuasaan ini bahkan mendorong Belanda untuk secara terang-terangan menyatakan bahwa tanah jajahan harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya dari sektor perdagangan untuk memberikan keuntungan kepada negeri Belanda.¹ Pernyataan ini berbanding terbalik ketika gubernur jenderal menjanjikan bahwa ia akan memajukan kesejahteraan Hindia Belanda dengan segenap usaha.² Tapi kenyataannya, prinsip tersebut tidak berlaku untuk penduduk pribumi, yang justru menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat pribumi dengan cara memberlakukan sistem-sistem yang diterapkan di Hindia Belanda yang dianggap menyengsarakan masyarakat pribumi.

Bentuk-bentuk diskriminasi kemudian bermunculan. Meski niatan untuk memberlakukan ide-ide liberalisme diarahkan juga kepada anak-anak pribumi. Akan tetapi, fasilitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak keturunan Belanda berbeda jauh dengan yang diperoleh oleh anak-anak pribumi. Bahkan Pemerintah Kolonial Belanda merasa hanya bertanggung jawab untuk membuat peraturan tanpa perlu adanya kewajiban menyediakan sekolah bagi masyarakat pribumi. Sehingga masyarakat pribumi justru mengalami kemerosotan dalam berbagai

¹ Zainal Masduqi, *Cirebon Dari kota Tradisional ke Kota Kolonial*, (Cirebon: Nurjati Press, 2011), hlm.75

² S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2001), hlm, 8.

sektor kehidupannya, yang bahkan hal ini menuai kritikan dari pihak Belandanya sendiri.³

Jika berbicara lebih jauh tentang pendidikan, di Indonesia masalah pendidikan ini memang sudah eksis sejak sebelum kedatangan Kolonial. Pendidikan yang berlangsung pada saat itupun, masih berbasis pendidikan keagamaan. Sejak masuknya pengaruh kolonialisme Belanda, pendidikan di Indonesia kemudian beradaptasi dengan pendidikan umum. Meski awalnya, pendidikan yang dibawa oleh Kolonial Belanda merupakan pendidikan untuk menciptakan para pekerja pribumi yang memiliki keahlian (*skills*). Sebagai syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang dikelola oleh Kolonial Belanda.

Menyoroti tentang hal tersebut di atas, pendapat Nurcholish Madjid barangkali bisa jadi memang ada benarnya. Menurutnya, “Seandainya negeri kita tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikannya akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren”.⁴ Karena pendidikan di Hindia Belanda sebelum kolonialisme berlangsung memang masih berbasis keagamaan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya pesantren yang berdiri dan tersebar luas di Pulau Jawa.⁵

Jika saja pendidikan berbasis pesantren semakin berkembang luas, pihak kolonial Belanda akan semakin merasa terancam. Karena bagi pihak kolonial, Islam dipandang sebagai ancaman terhadap kebijakan

³ *Ibid*, S. Nsution, hlm. 10.

⁴ Moh. Selamat Untung, *Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren*, *Forum Tarbiyah* Vol. 11, 1, Juni 2013: Pekalongan. Dikutip pada 12 Februari 2020

⁵ *Ibid*, Moh. Selamat Untung. Hlm. 3.

keamanan dan ketertiban (*rust en orde*). Bahkan mengancam keberlangsungan pendudukan dan penjajahan mereka di Nusantara.⁶

Kegelisahan ini bahkan sudah ditunjukkan oleh sikap Gubernur Jenderal Van der Capellen tahun 1816 yang memerintahkan kepada para Bupati di Jawa untuk menyelidiki sistem pesantren, dan seberapa jauh pengaruhnya bagi masyarakat itu sendiri.

Pendidikan ala kolonial pada abad ke-19 belum secara signifikan berkembang di tanah Jawa khususnya di Cirebon. Karena Pemerintah Hindia Belanda kekurangan pendanaan. Namun secara perlahan-lahan, pendidikan Kolonial semakin eksis dan bersaing dengan pendidikan pesantren. Secara khusus, pendidikan yang diselenggarakan kolonial Belanda dijadikan instrumen yang ampuh untuk mengurangi dominasi dan akhirnya bisa mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia.

Berbagai strategi pelumpuhan Islam mulai dilakukan. Salah satunya ketika Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan undang-undang pada tahun 1818 yang berisi ketentuan tentang semua sekolah negeri Belanda bisa dimasuki baik oleh orang Eropa maupun sebagian kecil masyarakat pribumi. Keadaan ini terus berlangsung, sampai tahun 1848 di mana pemerintah kolonial belum menunjukkan usahanya yang sungguh-sungguh untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Sehingga pada tahun 1849, hanya 37 orang saja dari kalangan masyarakat pribumi yang berada di sekolah-sekolah Eropa di Pulau Jawa.⁷

⁶ Ary H. Gunawan, *kebijakan kebijakan pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 21.

⁷ Dadang Supardana, *Menyingkap perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang (prespektif pendidikan kritis)*, Vol 1, Nomor 2, september 2008. Diambil pada hari senin 12 Februari 2020 pukul 17.32 WIB. di <http://Sejarah.upi.edu/artikel/menyingkapperkembanganpendidikansejakmasakolonialhinggasekarangprespektifpendidikan kritis.com>

Lalu ketika sudah memasuki abad ke-20, era baru dalam dunia politik kolonial pun dimulai. Tepat ketika era politik etis (politik balas budi) mulai diberlangsungkan. Dimana semboyan dari zaman baru ini menitikberatkan pada kemajuan. Kata-kata yang menandakan kemajuan, seperti *voortgang opheffing* (kemajuan), *ontwikkeling* (perkembangan), *opvoeding* (pendidikan) menambah rentetan diksi baru yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan secara bersama-sama.

Lahirnya politik etis ini menjadi awal baru dalam perluasan pelayanan pendidikan gaya barat dan diarahkan untuk memajukan penduduk Bumiputra⁸ melalui pendidikan ala barat.⁹ Pendidikan ini tidak hanya memproduksi spesialisasi tenaga kerja yang diperlukan oleh negara dan kegiatan bisnis swasta Belanda. Bahkan menjadi alat utama mengangkat bumiputra dan menuntun mereka menuju modernitas serta menyatukan masyarakat Timur dan Barat. Sehingga pada awal abad ke 20 pendidikan gaya Barat berkembang luas.¹⁰ Va Deventer menerapkan Politik etis (*Etische Politiek*) melalui moto "*De Eereschuld*" (hutang kehormatan) dengan slogan sebagai berikut: pendidikan, imigrasi dan irigasi.

Ketika pada tahun 1906, Cirebon berubah menjadi *gemeente* (kotamadya). Diberlakukannya Cirebon sebagai *gemeente* tentunya berpengaruh pada perkembangan pendidikan di Cirebon. Bentuk perkembangan itu ditandai dengan kurangnya perhatian yang diberikan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi kalangan bumiputra. Untuk pertama kalinya, Pemerintah *Gemeente*

⁸ Anak negeri atau penduduk Asli

⁹ Budi Darmoko, *Tinjauan historis Hak pendidikan di Hindia Belanda pada masa Kolonial tahun 1908-1928*, (skripsi), Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal 2.

¹⁰ Zaenal Masduqi, *Cirebon Dari kota Tradisional ke Kota Kolonial*, *Op.Cit*, hlm. 74.

mendirikan sekolah dasar tahun 1912 dengan nama *Europeesch Legere School* yang merupakan sekolah dasar untuk golongan Eropa. Hanya golongan pembesar (anak Raja dan orang-orang yang mempunyai kedudukan di pemerintah Belanda) dan golongan elite Eropa yang dapat sekolah di sini.¹¹

Pada perkembangan selanjutnya Kolonial Belanda mendirikan HIS (*Holand Inlander School*) atau sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak bumiputra yang memiliki kedudukan di pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, di lingkungan etnis Cina telah berdiri sekolah Tionghoa dengan pengantar Bahasa Mandarin pada tahun 1903 bernama *Hwee Kwan* yang dipelopori oleh Mayor Tan Tjien Kie. Dalam rangka menyaingi perkembangan sekolah tersebut, maka Pemerintahan Gemeente pada tahun 1915 mendirikan *Hollandsch Chineesche School* dengan pengantar berupa Bahasa Belanda.

Kemudian tahun 1925 pertama kalinya Belanda mendirikan sekolah setingkat SMP dengan sebutan *Meer Uitgebreith Lager Onderwijks* (MULO) yang merupakan sekolah lanjutan ELS (*Europeesch Legere School*), HIS (*Holand inlander school*) dan HCS (*Hollandsch Chineesche School*) yang secara terbuka untuk semua golongan. Sekolah MULO ini menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda.

Setelah berdirinya sekolah-sekolah yang diperuntukkan untuk kalangan atas saja, pihak kolonial Belanda mendirikan sekolah desa dan diperuntukkan bagi anak-anak dari kelas menengah ke bawah yang disebut *Volkschool* (VC) dengan masa belajar yang ditempuh yaitu selama 3 tahun. Pelajaran yang diajarkan masih di tingkat dasar yaitu membaca menulis dan berhitung dan bahasa yang dipakai adalah Bahasa

¹¹ R. Wachjono, *Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran Rendah dalam Kota Tjirebon*, dalam buku *Peringatan 50 Tahun Kota Besar Tjirebon 1906-1965*. hlm. 71

Jawa. Setelah 3 tahun kemudian dilanjut ke sekolah *Vervolgschool* (sekolah sambungan) masa belajarnya selama 2 tahun yang terdiri dari kelas 4 dan 5. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah *Volkschool*.

Sekolah *Volkschool* dan *Vervolgschool* memiliki perbedaan dengan sekolah ELS, HCS dan HIS di mana dalam sekolah ELS, HCS dan HIS ini masa belajar dalam sekolah ini selama 6 tahun penuh tidak dipisah menjadi 2 sedangkan dalam sekolah desa ini terbagi menjadi 2 yang mana *Volkschool* masa belajar selama 3 tahun yaitu kelas 1, 2 dan 3 yang kemudian dilanjut dengan *Vervolgschool* yang masa belajarnya selama 2 tahun yaitu terdiri dari kelas 4 dan 5.

Karena alasan politik, kolonial Belanda memisahkan pendidikan Islam dan sistem pendidikan umum yang dikembangkan. Pemisahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintahan Kolonial Belanda yang anti Islam. Sejak pemisahan tersebut lembaga pendidikan Islam kemudian mengambil jalannya sendiri. Lepas dari *gubernmeen*. Tetap berpegang pada tradisi sendiri. Meskipun tetap terbuka pada perubahan. Dengan demikian, sejak permulaan abad ke-20 pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dan terpisah dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Salah satu model bentuk pendidikan tersebut berupa pesantren.¹²

Berdirinya pesantren/sekolah keagamaan merupakan respon masyarakat muslim terhadap dominasi imperialis Belanda saat itu. Hal ini tidak berarti bahwa pesantren baru didirikan setelah imperialis Belanda berhasil melumpuhkan politik Islam di Indonesia.¹³

Setelah berdirinya sekolah-sekolah kolonial, kemudian muncul sekolah-sekolah yang didirikan masyarakat. Hal ini merupakan reaksi

¹² Moh. Selamat Untung, *Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren*, *Op.Cit.* hlm. 1.

¹³ *Ibid*, Moh. Selamat Untung, hlm. 2.

masyarakat terhadap pendidikan Kolonial Belanda, yang mana dalam pendidikan yang didirikan kolonial Belanda yang hanya memperhatikan pendidikan dari pribumi yang berasal dari golongan atas saja. Karena itulah kemudian muncul pendidikan-pendidikan dari masyarakat itu sendiri yang berbasis pendidikan keagamaan. Dan pembangunan madrasah-madrasah di Cirebon awal berdirinya sekitar tahun 1910.

Pada dasarnya pendidikan yang diterapkan oleh Belanda pada kenyataannya hanya ditujukan untuk pribumi eksklusif (Bumi Putera). Hal ini dapat terlihat dari pembangunan lembaga-lembaga pendidikan yang ditunjukkan bagi kalangan pribumi golongan atas saja. Dalam pendirian sekolah-sekolah tersebut banyak bertentangan diantara orang-orang Belanda sendiri sehingga pendidikan yang diberikan sangat tidak maksimal. Hal ini yang memicu golongan elite pribumi seperti Ki Hajar Dewantara membangun sekolah swasta pribumi dengan nama Lembaga Pendidikan Taman Siswa (Tamsis), *National Onderwijs Institut Taman Siswa* yang terletak di samping Keraton Kanoman pada tahun 1923.¹⁴

Sekolah ini merupakan sekolah yang berbasis budaya lokal masyarakat Jawa. Sekolah Taman Siswa ini berpusat di Balai Ibu Pawaiyatan (Majlis Luhur) di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di seluruh Indonesia.¹⁵ Selain Taman Siswa ada madrasah Al Irsyad, dan sekolah Muhammadiyah.¹⁶

Titik puncak upaya penataan, perluasan dan perbaikan terhadap pendidikan tercapai hingga sekitar tahun 1930. Setelah itu, datang

¹⁴ Anggota tetap Taman Siswa Cirebon, *Sejarah Perjuangan Taman Siswa*, Cirebon, 11 Maret 2015, dalam web. Tamansiswacirebon.com, diunduh pada tanggal, 18 Oktober 2019, pada pukul 17.00 WIB.

¹⁵ Dyah Kumalasari, *Konsep Pemikiran Ki Hajar dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis Religius)*, *ISTORIA Vol. VIII No. 1 September 2010*

¹⁶ Abdul Hadi, *Dinamika Pendidikan Islam Di Kota Cirebon 1910-1945*, (Tesis), *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, (Cirebon: Nurjati press, 2014). Hlm. 139

gelombang masa depresi yang menghentikan semua perkembangan besar yang baru. Walaupun jumlah tempat untuk bersekolah bagi anak-anak terus bertambah. Tentunya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial terhadap pendidikan di Cirebon tujuannya adalah untuk menekan pendidikan pribumi dan mengembangkan pendidikan Belanda ala Eropa. Kebijakan inilah yang diambil oleh Pemerintah Kolonial untuk menanamkan pendidikan ala Eropa agar bisa diterapkan di Hindia-Belanda dan mempengaruhi rakyat pribumi. Kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini memiliki pengaruh bagi masyarakat Cirebon sebagai modal perjuangan masyarakat Cirebon untuk mendirikan lembaga pendidikan yang muncul dari masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari uraian di atas, pembahasan mengenai pendidikan Kolonial di Cirebon semakin membuat penulis tertarik untuk menuliskannya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kolonial mengenai peraturan pendidikan di Cirebon dan masih terdapatnya sekolah-sekolah bekas kolonial Belanda merupakan bukti keberadaan sekolah Kolonial di Cirebon. Oleh sebab itu, untuk menelusuri lebih dalam terkait pendidikan kolonial di Cirebon, maka penulis mengajukan topik terkait ***KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAHIRNYA LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON PADA TAHUN 1900-1942.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan pokok dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana kebijakan pendidikan Kolonial Belanda?

2. Bagaimana pengaruh terhadap lembaga pendidikan masyarakat Cirebon pada tahun 1900-1942?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan ini, penulis akan membatasi beberapa hal berkenaan dengan pendidikan di Cirebon pada tahun 1900-1942 diantaranya yaitu :

Pertama, berkenaan dengan penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kebijakan pendidikan kolonial di Cirebon antara tahun 1900 hingga tahun 1942. Dimana fokus penelitian penulis pada wilayah Cirebon yang merupakan daerah pantai utara Jawa Barat.

Kedua, berkenaan dengan tahun penelitian (*spatial*), penulis membatasi rentang waktunya agar pembahasan tidak melebar dan tetap pada ruang lingkup waktu yang telah ditentukan yang dimulai tahun 1900. Dimana tahun ini merupakan tahun kebijakan politik etis (politik balas budi). Politik ini mengedepankan pada tiga hal salah satunya adalah pendidikan. Tahun 1942 menjadi tahun akhir dari penelitian penulis karena pada tahun ini terjadi peristiwa pergantian pemerintah kolonial Belanda oleh pihak Jepang dan pada saat itu sekolah-sekolah ditutup selama beberapa bulan kemudian pada tanggal 1 April 1942 sekolah dibuka kembali dalam bentuk baru.

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kebijakan pendidikan Kolonial Belanda
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pendidikan kolonial Belanda terhadap lahirnya lembaga pendidikan masyarakat Cirebon pada tahun 1900-1942

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan tentang kebijakan pendidikan di kota Cirebon pada tahun 1900-1942. Seperti telah diketahui bahwa Kolonial Belanda pernah menginjakkan kakinya di Indonesia. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh terhadap kondisi pendidikan di Cirebon. Hal tersebut berasal dari pengaruh yang dibawakan pada masa kolonial. Seperti diketahui, kedatangan kolonial membawa dampak desentralisasi yang secara tidak langsung berdampak juga pada perubahan sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang kebijakan pendidikan kolonial Belanda dan pengaruhnya terhadap lahirnya lembaga pendidikan masyarakat yang mencakup wilayah Cirebon pada tahun 1900-1942.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap perkembangan penulisan atas rekonstruksi sejarah pendidikan yang berada di Kota Cirebon, dan dapat menjadi masukan bagi para peneliti di masa yang akan datang tentang pendidikan di Cirebon masa kolonial Belanda, baik dalam tema yang sama maupun tema yang lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kota Cirebon.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mengambil sumber yang dapat dipercaya untuk memperkaya konten tulisan ini di antaranya diambil dari artikel, jurnal, skripsi dan dari buku-buku. Adapun artikel, jurnal, skripsi dan dari buku-buku tersebut di antaranya, yaitu:

1. Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri yang berjudul *“Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942”*, Universitas Jember, Volume 1 No. 3 pada Maret 2015 lalu. Jurnal ini membahas tentang pendidikan kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942. Jenjang pendidikan di Surabaya berawal dari pendidikan tradisional yang bersifat nonformal (tidak ada jenjang pendidikan). Setelah pemerintahan Kolonial Belanda (PKB) datang ke Hindia Belanda, kemudian memperkenalkan sistem pendidikan formal (terdapat jenjang pendidikan). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis peristiwa di masa lampau. Berdirinya sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda di Surabaya dilatarbelakangi adanya perkembangan peraturan bahwa pendirian sekolah-sekolah Belanda di Hindia yang berada di daerah dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan perkebunan yang luas di sana. Kajian yang dimuat dari jurnal ini membahas tentang pendidikan di masa kolonial tahun 1901-1942.

Persamaan dari jurnal dan karya tulis ini yaitu sama-sama membahas tentang pendidikan masa kolonial Belanda. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Surabaya. Sementara penulis melakukan penelitian di Cirebon selain itu dalam penulisan tahun terdapat perbedaan dimana dalam jurnal ini dibahas pada tahun 1901-1942 sedangkan dalam skripsi ini dibahas tahun 1900-1942.

2. Veronika Horohiung yang menulis sebuah jurnal berjudul *“Pendidikan Formal Era Hindia Belanda di kepulauan Sangihe pada Tahun 1848-1945”* pada Jurnal pendidikan Sejarah Vol. 5 No. 2 Juli 2016. Jurnal ini menggambarkan fokus masalah penelitian yang

berkaitan dengan perkembangan pendidikan formal di Kepulauan Sangihe selama kurun waktu akhir abad XIX dan awal abad XX. Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai tujuan dari pendirian lembaga pendidikan oleh Belanda yang pada awalnya didirikan bukan untuk kepentingan orang Indonesia apalagi orang Sangihe. Tapi pendirian pendidikan ini ditujukan untuk kepentingan Kolonial Belanda, yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerintahan dan untuk mengisi tenaga pada perusahaan swasta Belanda.

Persamaan skripsi ini dengan karya tulis ini adalah sama-sama membahas tentang pendidikan masa kolonial Belanda. Perbedaan karya tulis ini dengan jurnal ini dilaksanakan pada masa penelitiannya. Jurnal tersebut mengkaji peristiwa sejarahnya mulai dari tahun 1848-1945, sedangkan dalam karya tulis ini mengkaji peristiwa sejarah selama rentang tahun 1900-1942. Selain tahun, perbedaan penelitian ini juga digambarkan melalui pengambilan lokasi penelitian yang berbeda, di mana jurnal ini membahas pendidikan di Kepulauan Sangihe yang berada di Sulawesi Utara. Sedangkan karya tulis ini membahas pendidikan di kota Cirebon.

3. Abdul Hadi, *Dinamika pendidikan Islam di Kota Cirebon Tahun 1910-1945*, Tesis. Program Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014. Dalam tesis ini dibahas tentang pendidikan Islam di Kota Cirebon Masa kolonial Belanda tahun 1910-1945 tulisan ini menghasilkan, beberapa temuan penting mulai dari relasi konflik antara lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pendidikan kolonial. Sedangkan dalam skripsi ini dibahas tentang Kebijakan Kolonial Belanda dalam bidang pendidikan dan Pengaruh terhadap lahirnya Lembaga Pendidikan Masyarakat di kota Cirebon pada tahun 1900-1942.

Persamaan skripsi ini dengan tesis di atas yaitu dalam tesis ini terdapat pembahasan tentang pendidikan masa kolonial Belanda. Perbedaan antara tesis dan skripsi ini adalah dalam pengambilan tahun yang berbeda dalam karya tulis ini dibahas tahun 1900-1942 sedangkan dalam tesis ini dibahas tahun 1900-1945.

4. Cristian Maria Goreti yang menulis jurnal berjudul "*Chung Hua School Sebagai Representasi Pendidikan Etnis Tionghoa di Jember Tahun 1911-1966*". Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. Jurnal ini berisi uraian mengenai keberadaan sekolah berbasis etnis Tionghoa di Jember yang disebut Chung Hua School. Selain itu, jurnal ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pendirian sekolah tersebut, kelompok pencetus, tujuan didirikan, efek keberadaan terhadap kelompok masyarakat tertentu, relevansi kondisi politik Indonesia dengan keberlangsungan sekolah tersebut, hingga faktor-faktor penyebab penutupannya.

Persamaan skripsi ini dan karya tulis di atas dimana dalam pembahasan dibahas pendidikan pada masa kolonial Belanda. Perbedaan jurnal dengan karya tulis ini adalah, jurnal ini membahas pendidikan yang dikhususkan untuk etnis Tionghoa di Jember pada 1911-1966. Sedangkan dalam karya tulis ini dibahas tentang pendidikan kolonial yang berada di Cirebon pada tahun 1900-1942.

5. Liza Rivai dalam tesis berjudul "*Perkembangan Pendidikan di Residen Palembang 1900-1940*", Universitas Gajah Mada, 1997. Politik yang berorientasi etika telah menciptakan banyak peraturan seperti yang menyangkut penyebaran pendidikan di masyarakat dan peningkatan administrasi pemerintahan. Meningkatkan kondisi ekonomi dan memunculkan posisi pemerintahan dalam peraturan baru sistem pemerintah menunjuk kebutuhan personal yang

berpendidikan. Awal abad ke 20 merupakan titik tolak diterbitkan politik etis. Politik etis yang menghendaki beberapa peraturan seperti penyebarluasan pendidikan, pengembangan dalam bidang pemerintah. Adanya kebutuhan dengan dana investasi dan kebutuhan dana dalam sistem pemerintahan baru maka perlu tenaga terdidik.

Persamaan skripsi ini dan karya tulis diatas dimana dalam pembahasan, membahas pendidikan pada masa pemerintah kolonial Belanda. Perbedaan tesis ini dengan karya tulis ini adalah dimana dalam pengambilan tempat yang berbeda di mana dalam tesis ini mengambil tempat di Palembang, sedangkan dalam karya tulis ini mengambil di Cirebon. Dalam pengambilan tahun pun sedikit berbeda di mana dalam tesis ini diambil pada tahun 1900-1940, sedangkan dalam karya tulis ini diambil pada tahun 1900-1942.

6. Proyeksi Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah yang merilis buku berjudul "*Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah*" dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1981/1982. Buku ini membahas tentang sejarah pendidikan daerah sulawesi tengah yang mencakup seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang meliputi 4 kabupaten masing-masing Kabupaten Donggala Kabupaten Poso, Kabupaten Luwuk Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Buku ini menjelaskan tentang pendidikan sebelum kedatangan kolonial belanda, pada masa Kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang di Sulawesi. Pada akhir abad ke-19 penjajah Belanda masuk ke Sulawesi Tengah danmendapat perlawanan dari penguasa atau raja-raja setempat pada saat itu. Akan tetapi segala perlawanan tadi dapat ditekan oleh Belanda dengan memakai siasat adu domba antara raja-raja di

Sulawesi Tengah. Seiring dengan berkuasanya Kolonial Belanda maka Agama Kristen dikembangkan melalui *zending*. Untuk melancarkan pelaksanaan *Zending* maka dibuka sekolah-sekolah oleh A.C. Krujit.

Persamaan skripsi ini dan karya tulis diatas adalah dimana sama-sama membahas tentang sejarah pendidikan. Perbedaan buku ini dengan karya tulis ini yaitu dalam buku ini membahas mengenai sejarah pendidikan Daerah Sulawesi Tengah, sedangkan dalam karya tulis ini dibahas mengenai kebijakan Kolonial Belanda dan pengaruh pendidikan terhadap lembaga pendidikan masyarakat Cirebon pada tahun 1900-1942.

F. Landasan Teori

Agar seorang peneliti dapat mempertanggungjawabkan tulisannya maka seorang peneliti memerlukan suatu kerangka teori sebagai landasan dalam suatu penelitian yang berkaitan. Teori adalah suatu perangkat prinsip-prinsip terorganisir mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan.¹⁷ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.¹⁸ Kebijakan menurut David Easton adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan

¹⁷ Restu Wijayanto, *Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, (TT), hlm 1.

¹⁸ Said Zainal Abidin, *kebijakan publik*, (Jakarta: Yayasan pancur siswa,2004), hlm.20

untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.¹⁹

Menurut Laswell dan Kaplan, kebijakan adalah alat untuk menggapai tujuan dimana kebijakan didefinisikan sebagai sebuah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, dan praktek. Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti “selalu menggunakan akal dan budi daya, pandai, mahir”.²⁰

Menurut KBBI kebijakan berasal dari kata dasar bijak kemudian diberi kata imbuhan ke dan an, maka kebijakan berarti “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaanm kepemimpinan”. Dalam pengertian di atas terdapat dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: *pertama*, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. *Kedua*, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan suatu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.²¹

Pada awal abad ke 20 pemerintah Kolonial Belanda melakukan beberapa kebijakan salah satunya adalah kebijakan tentang pendidikan, di mana pada abad ini dimulainya perubahan terhadap pendidikan masyarakat, yang awalnya pendidikan pribumi tidak begitu diperhatikan namun ketika abad 20 diterapkan politik etis (politik balas budi) yang juga diambil ke dalam dunia pendidikan.

¹⁹ *Ibid*, hlm.21

²⁰ Hesel Nogi S dan Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi* (yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset, 2003), hlm. 3

²¹ *Ibid*, hlm.4

Adapun sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial untuk pribumi yaitu:

Sekolah Kelas I, sekolah ini merupakan sekolah yang disediakan untuk Bumiputra yang berasal dari kalangan atas atau pribumi yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan Kolonial Belanda.

Sekolah kelas II, sekolah ini merupakan sekolah yang disediakan untuk masyarakat pribumi dari kalangan bawah atau masyarakat umum.

2. Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dalam konteks ini, pengaruh terhadap kebijakan pendidikan kolonial Belanda terhadap pendidikan masyarakat menimbulkan adanya ketidakpuasan. Sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat yang kemudian berupaya untuk melakukan aksi-aksi penolakan terhadap pendidikan yang disediakan kolonial sehingga untuk mengimbangi dan sebagai bentuk penolakan terhadap pendidikan tersebut masyarakat kota Cirebon mendirikan sekolah-sekolah dimana dalam sekolah tersebut bersifat nasionalis dan keagamaan dimana dalam mata pelajarannya menggabungkan pelajaran keagamaan dengan mata pelajaran umum seperti sekolah yang disediakan oleh kolonial Belanda.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan sosial historis sebagai metode penelitian. Dimana peneliti mendeskripsikan menggunakan metode historis. Metode historis yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan-peninggalan dari peristiwa-

peristiwa masa lalu. Maka dalam penulis ini penulis menggunakan metode yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan objektif. Dalam metode historis penelitian memiliki empat tahap yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal bagi seorang sejarawan dalam melakukan penelitian. Heuristik menurut Carrad. Heuristik berasal dari bahasa Jerman *Quellenkunde* yang berarti sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk memperoleh data atau materi sejarah, atau fakta sejarah. Heuristik seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.²² Rupanya agak berbeda dengan G. J Renier yang berpendapat bahwa heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan dan menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan. Selain itu, seorang peneliti dapat mencatat sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu.

Dalam melakukan pencarian sumber-sumber sejarah tentang pendidikan di Cirebon pada masa Kolonial Belanda, penulis menggunakan sumber primer dan sekunder di antaranya, yaitu:

Sumber primer, dalam melakukan pencarian sumber primer penulis telah menelusuri pencarianinggalan-tingalan sejarah ke dinas kearsipan yang berkaitan tentang kebijakan pendidikan di

²² Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 104

Cirebon masa Kolonial Belanda pada tahun 1900-1942. Adapun sumber primer yang digunakan pada skripsi ini berupa arsip, *Staadblad*, *Gedeng Book* yang berkenaan dengan *zendaag* (sekolah) dan Arsip *Graphische Voorstelling van de Plasts, Die de Inlandesche Scholand in Het Stelsel Innement*.

Selain itu penulis juga melakukan pencarian sumber sekunder yang diambil dari buku-buku dan artikel karya penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan tentang pembahasan mengenai kebijakan pendidikan pada tahun 1900-1942 atau melalui buku-buku yang bersinggungan dengan sejarah pendidikan pada abad ke 20, yaitu: Sejarah pendidikan Indonesia, sejarah pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajah, Gerakan Modern Islam Indonesia, Sejarah pendidikan Islam Indonesia, Sejarah Pendidikan Nasional, dan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan tentang pendidikan pada masa Kolonial Belanda.

Studi lapangan yang penulis lakukan yaitu menelusuri (observasi) sekolah-sekolah di Kota Cirebon yang menjadi objek penelitian penulis seperti menelusuri sekolah-sekolah yang masih tersisa dan masih aktif dari masa Kolonial Belanda hingga saat ini.

2. Kritik Sumber

Setelah semua data terkumpul kemudian tahapan selanjutnya bagi seorang peneliti adalah melakukan pencarian sumber sejarah yakni kritik sumber. Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk

mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber.²³ Kritik sumber meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.²⁴

Kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Kritik internal yakni ditunjukkan untuk memahami isi teks. Pemahaman isi teks ini diperlukan untuk latar belakang pikiran dan budaya penulisnya.²⁵

Kritik eksternal ini yakni seorang penulis melakukan dengan cara menyeleksi sisi-sisi fisik dari sumber yang didapat. Seperti, sumber yang didapat berupa dokumen arsip maka harus diteliti kertasnya, kata-katanya, bahasanya, kalimatnya, tinta yang digunakan, gaya tulisannya, juga bentuk luar dari sumber tersebut. Sumber berbentuk benda, penulis menelitinya dari segi benda tersebut ada dan segi bentuk fisik bangunannya yang didapat, sesuai atau tidaknya dengan bukti dan fakta yang ada. Kritik eksternal mengarah pada pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Otentisitas mengacu pada materi sumber yang sezaman.²⁶

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya setelah melakukan kritik sumber, hal yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan yaitu ketika ingin melakukan penulisan terhadap sejarah yaitu interpretasi. Interpretasi

²³ Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35

²⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah (Teori, Metode, Contoh Aplikasi)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm. 101

²⁵ Suhartono W. Pranoto, *Op, Cit*, hlm. 36.

²⁶ *Ibid.* Suhartono W. Pranoto, hlm. 37.

mengandung makna penafsiran.²⁷ Maka interpretasi bertujuan menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah yang akan dibahas.

Maka pada tahapan ini penulis berusaha menguraikan beberapa fakta yang telah terkumpul sebelumnya dan telah diseleksi pada tahap verifikasi sumber atau kritik sumber. Bukan sekedar menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapat. Penulis juga mengkorelasikan fakta-fakta yang telah diperoleh dari hasil kritik sumber yang kemudian disusun secara kronologis menjadi sebuah penjelasan yang mudah dipahami.

4. Historiografi

Tahap terakhir yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan yakni historiografi. Historiografi merupakan cara merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah.²⁸ Setelah melewati tahapan-tahapan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis melakukan pelaporan hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi sebagai hasil karya dalam sebuah penelitian sejarah.

Pada tahap terakhir ini pula, penulis menuangkan dan menyusun segala informasi yang telah diverifikasi, yang kemudian dituangkan dalam tulisan ini berdasarkan analisa penulis. Tujuannya agar tulisan ini dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan skripsi yang valid. Sehubungan dengan penelitian tersebut, maka penyampaiannya secara garis besar terdiri atas beberapa bagian yakni: pendahuluan, hasil penelitian dan

²⁷ M. Dien Madjid, dkk, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm. 29

²⁸ Sulasman, *Op.cit* , hlm. 148

kesimpulan. Yang terdiri atas lima bab yang penjabarannya akan saling berhubungan anantara satu bab dengan bab lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulian skripsi ini rapih maka penulis menyusun secara sistematis yang dibagi ke dalam lima bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub, yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub yaitu: latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran tentang seluruh rangkaian penulisan penelitian sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

Bab II, akan menguraikan kondisi pendidikan menjelang abad ke-20 yang akan disajikan dalam dua subbab pembahasan yaitu keadaan pendidikan di Indonesia dan situasi pendidikan sebelum abad ke-20.

Bab III akan menguraikan Kebijakan-kebijakan pendidikan Kolonial Belanda di Cirebon pada abad ke-20 yang akan diuraikan dalam dua subbab pembahasan yaitu sebagai berikut: kebijakan pemerintah Kolonial terhadap pendidikan dan strategi pendidikan Kolonial Belanda di Kota Cirebon.

Bab IV akan menguraikan mengenai pengaruh kebijakan Kolonial Belanda terhadap lembaga pendidikan masyarakat Cirebon pada tahun 1900-1942 yang akan diuraikan dalam dua subbab pembahasan yaitu; kesadaran masyarakat Cirebon terhadap pendidikan dan lahirnya lembaga pendidikan masyarakat di Kota Cirebon.

Bab V merupakan bab terakhir jawaban atas rumusan masalah yang terdiri dari kesimpulan dan saran.